

PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRATIS MAHASISWA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Rexi Pandri¹, Eva Damayanti², Metri Afriani³, Rahmi Putri Pratama⁴, Nurhayati⁵,
Juneti⁶, Angga Karomi⁷
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu^{1,2,3,4,5,6,7}
nurhayatiips4b@gmail.com¹

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui nilai demokrasi mahasiswa melalui pendidikan kewarganegaraan. **Metode penelitian** ini dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. **Hasil penelitian** menunjukkan mahasiswa juga harus selalu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, agar perannya sebagai agen perubahan di masyarakat bisa semakin optimal. Nilai demokrasi pada masa sekarang ini bisa ditanamkan sejak dini melalui kegiatan saling menghargai satu sama lain. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 1) Berpikir kritis terhadap isu Kewarganegaraan; 2) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Berkembang secara positif dan demokratis; 4) Berinteraksi dengan bangsa lain. **Simpulan** penelitian bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran dengan fokus pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci: Mahasiswa, Nilai-Nilai Demokratis, Pendidikan Kewarganegaraan.

ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the value of student democracy through civic education. This research method was conducted using a descriptive method with a qualitative approach. The results of the study show that students must always implement democratic values, so that their role as agents of change in society can be more optimal. Today's democratic values can be instilled from an early age through mutual respect for one another. The objectives of Citizenship Education include: 1) Thinking critically about Citizenship issues; 2) Participate in the life of society, nation and state; 3) Develop positively and democratically; 4) Interact with other nations. The conclusion of the study is that Citizenship Education is a subject with a focus on self-formation that is diverse in terms of religion, socio-cultural, language, age, and ethnicity to become intelligent, skilled, and characterized Indonesian citizens based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Keywords: Citizenship Education, Democratic Values, Students

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk social yang sejak lahir hingga dengan kematiannya, selalu berada dalam suatu lingkungan sosial yang berbeda-beda satu sama lain (Widjaja,1986). Manusia dapat dikatakan tidak terlepas dari lingkungan masyarakat tempat hidup bersama serta berinteraksi dengan individu yang lain. Menurut Subadi (2008), “Manusia hidup dalam masyarakat, akan saling berhubungan dan saling membutuhkan sama lain. Kebutuhan itulah dapat menimbulkan suatu proses interaksi sosial”. Kebutuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan materi dan non materi.

Perilaku kehidupan masyarakat terutama di lingkup perguruan tinggi, pembentukan nilai-nilai demokrasi harus selalu dibangkitkan. nilai-nilai demokrasi harus selalu dibangkitkan karena memiliki tujuan untuk menciptakan suasana demokratis antar mahasiswa, yang akhirnya menimbulkan suasana harmonis. Kalangan mahasiswa juga harus selalu mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, agar perannya sebagai agen perubahan di masyarakat bisa semakin optimal. Demokrasi adalah salah satu bentuk mekanisme system pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kedaulatan yang dijalankan oleh rakyat. Semua rakyat atau dalam hal ini warga, memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup masyarakat. Demokrasi mengizinkan setiap orang untuk berpartisipasi baik secara langsung ataupun melalui perwakilan, dalam perumusan pengembangan serta pembuatanhukum.

Nilai-nilai demokrasi tentu saja menjadi salah satu objek kajian di perguruan tinggi, khususnya oleh mahasiswa yang menempuh studi di Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial. Perkuliahan di Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Bengkulu, selain membicarakan nilai demokrasi juga tentang nilai hukum, nilai Pancasila, hak-kewajiban warga negara, dan masih banyak lagi. Kajian dari hal tersebut diberikan secara rinci dengan harapan dapat diterima mahasiswa sebagai agen perubahan yang kelak membawa kebaikan bagi masyarakat.

Partisipasi generasi baru dalam sistem politik yang demokratis akan terjadi apabila generasi baru memiliki kualitas dan kemampuan antara lain: 1) Memiliki identitas diri termasuk komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang lebih luas dan kemampuan untuk berkelompok secara terorganisir dalam kehidupan bermasyarakat; 2) Memiliki kesadaran bahwa kebijakan yang diputuskan dalam proses politik baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka; 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memperoleh informasi guna memberikan pedoman dalam kehidupan sosial politik, termasuk di dalamnya memahami demokrasi dan fungsifungsi lembaga yang ada, isu-isu yang penting, dan cara-cara berpartisipasi yang efektif; 4) Memiliki keseimbangan antara trust dan skeptis atas kehidupan politik yang ada, sehingga memberikan suatu pemikiran, sikap dan tindakan tidak asal ikut atau sebaliknya tidak asal berbeda, melainkan partisipasi yang rasional; 5) Memiliki kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan; 6) Memiliki kapasitas dan kemauan untuk bersama-sama membicarakan perbedaan dengan penuh toleransi; 7) Memiliki rasa hormat kepada individu baik dalam kelompoknya maupun yang ada di luar kelompok; 8) Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dan bernegosiasi, termasuk kemampuan untuk bekerja dalam suatu tim dan menyajikan secara efektif argumentasi yang dimiliki tanpa menghina pendapat pihak lain; 9) Memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengambil peran kepemimpinan saat diperlukan; 10) Memiliki keyakinan atas kemampuannya untuk dapat berbuat

kebaikan baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, termasuk memiliki keyakinan bahwa institusi yang ada harus memberi respon yang baik terhadap tindakan yang dilakukan oleh warga masyarakat (Zamroni, 2003).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian terhadap status, sikap, pendapat kelompok, individu, perangkat kondisi dan prosedur suatu sistem pemikiran atau peristiwa dalam rangka membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis dan analitis yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah aktual pada masa kini. Penelitian deskriptif pada umumnya tidak menggunakan hipotesis namun dapat pula menggunakan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang akan dijawab setelah analisis selesai dilakukan untuk selanjutnya dapat di tarik kesimpulan (Hadi, 1998).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pihak-pihak yang diwawancarai antara lain mahasiswa serta dosen pengampu di Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Bengkulu. Observasi dalam hal ini melihat gejala yang terjadi di lokasi penelitian, yakni Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial IAIN Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Demokrasi

Nilai (Value) adalah suatu standart perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya standar perilaku guru dalam pembelajaran (kejujuran, keterbukaan, dan demokratis). Nilai merupakan hal yang melekat pada objek sehingga disukai dan dicari oleh banyak orang. Suatu objek akan bernilai jika ada subjek yang memberikan penilaian terhadap objek tersebut. Baik dan buruk penilaian yang diberikan pada suatu objek, tergantung dari aturan yang berlaku di masyarakat dan pengalaman orang yang memberikan penilaian. Nilai dijadikan suatu pijakan dan dipegang teguh oleh masyarakat menjadi suatu keyakinan.

Nilai demokrasi merupakan sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman di lingkungan sekolah, mampu mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan, percaya diri tidak bergantung pada orang lain dan mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah.

Menurut Saiful Arif (2012), nilai demokrasi merupakan sebuah pandangan hidup yang tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu saja tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat. Nilai demokrasi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebagai makhluk sosial dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul di lingkungan tersebut.

Beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai demokrasi adalah sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, menghargai kebebasan berpendapat, memahami dan menyadari keanekaragaman dalam lingkungan sekolah, serta perlakuan yang sama bagi semua siswa.

Nilai-nilai demokrasi telah ada sebelum Indonesia merdeka. Penanaman nilai demokrasi pada masa sekarang ini bisa ditanamkan sejak dini melalui kegiatan saling menghargai satu sama lain. Negara yang demokrasi akan terwujud

apabila seluruh warga masyarakatnya mempunyai nilai-nilai demokrasi. Perilaku dan budaya demokrasi juga harus dibangun dalam kehidupan bermasyarakat. Membangun budaya demokrasi tidak cukup dengan membuat peraturan yang harus dipatuhi masyarakat, akan tetapi juga perlu mengenalkan atau mensosialisasikannya kepadamasyarakat.

Senada dengan pendapat Zamroni (2001) yang menyebutkan nilai demokrasi yaitu, a) Toleransi; b) Kebebasan mengemukakan pendapat; c) Menghormati perbedaan pendapat; d) Memahami keanekaragaman dalam masyarakat; e) Terbuka dalam komunikasi; f) Menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan; g) Percaya diri atau tidak menggantungkan pada orang lain; h) Saling menghargai; i) Mampu mengekang diri; j) kebersamaan; k) Keseimbangan. Nilai demokrasi tidak secara langsung ditanamkan pada diri seseorang, melainkan tahap demi tahap. Nilai demokrasi yang menjadi fokus penelitian ini meliputi nilai berpartisipasi, toleransi dan saling menghargai.

Toleransi

Toleransi merupakan suatu sikap yang menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak setiap individu, baik hak beribadat sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk mengemukakan pendapat, hak menjalin hubungan sosial di masyarakat maupun hak-hak yang lain.

Menghargai perbedaan pendapat. Ciri dari kehidupan berdemokrasi adalah adanya kebebasan untuk berpendapat. Oleh karena itu dalam kehidupan berdemokrasi harus mampu menjunjung tinggi adanya keragaman pendapat dari masing-masing individu. Sikap menjunjung tinggi adanya perbedaan pendapat dalam kehidupan berdemokrasi ini ditunjukkan dari adanya nilai untuk menghargai setiap pendapat yang dikemukakan orang lain.

Memahami dan menyadari keanekaragaman masyarakat. Nilai yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi adalah adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat, baik keanekaragaman ras, suku, maupun agama. Tanpa adanya kesadaran adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat maka tidak mungkin nilai demokrasi dapat dijunjung setinggi-tingginya dan bahkan apabila adanya keragaman tersebut tidak diakui oleh anggota masyarakat maka yang timbul di masyarakat adalah perpecahan

Terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia. Sikap terbuka dan kemauan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam kehidupan berdemokrasi. Tanpa adanya kemauan untuk terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai dan martabat manusia maka yang ada dalam kehidupan bermasyarakat adalah saling menghina, merendahkan, dan menjatuhkan satu dengan yang lain.

Pengendalian diri. Nilai pengendalian diri dalam kehidupan berdemokrasi mutlak diperlukan agar setiap perbuatan yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Kemanusiaan dan kebersamaan. Sikap kemanusiaan dan kebersamaan adalah sudah menjadi salah satu nilai yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan berdemokrasi sebab sudah menjadi kodratnya manusia diciptakan sebagai makhluk individu dan sekaligus makhluk sosial. Dalam kehidupan sosial tanpa adanya kebersamaan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang timbul maka segala sesuatunya akan terasa sangat berat untuk diselesaikan.

Kepercayaan diri. Sikap percaya diri dalam kehidupan bermasyarakat sangat penting dimiliki oleh setiap anggota masyarakat guna mengurangi adanya sikap selalu menggantungkan diri kepada orang lain. Dengan adanya kepercayaan diri

yang mantap dalam diri setiap individu pada mereka cenderung akan terlebih dahulu berusaha menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi sebelum pada akhirnya meminta pertolongan orang lain.

Ketaatan pada peraturan yang berlaku. Taat dan patuh memiliki arti selalu melaksanakan segala peraturan yang ditetapkan. Ketaatan dan kepatuhan yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh akan mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan yang dibuat harus dilaksanakan secara bersama-sama sebab peraturan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama. Ketaatan dan kepatuhan juga merupakan modal yang utama bagi setiap orang untuk mewujudkan keadilan masyarakat secara keseluruhan

Pengertian Demokrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), demokrasi berarti sebagai berikut: a) Bentuk pemerintahan di mana segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya (partisipasi); b) Gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, kebebasan serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Dari akar kata di atas, kita bisa mengatakan bahwa demokrasi memiliki dua arti, yaitu: (1). Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Hal ini sesuai dengan akar kata demokrasi itu sendiri (demos: rakyat, dan cratein: memerintah). Maka secara harafiah, demokrasi berarti rakyat memerintah (Lincoln, 2003). (2). Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup. Demokrasi sebagai sebuah nilai tidak hanya berkaitan dengan urusan kepentingan saja, tetapi juga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat (Tim Abdi Guru, 2006)

Nilai-nilai demokrasi yang patut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam keluarga, sekolah, maupun dalam masyarakat, diantaranya: (a). Penghargaan atas kesamaan(kesederajatan); (b). Penghargaan atas kebebasan; (c). Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama (Musyawarah untuk mencapai mufakat) dan (d). Penghargaan atas perbedaan (pluralitas)

Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran adalah suatu proses perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan (Depdikbud, 1994). pembelajaran merupakan suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi yaitu pendidik dan peserta didik, unsur material yaitu materi pelajaran yang diperoleh peserta didik, fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana yang disediakan seperti ruang kelas, perlengkapan yang terdiri dari buku-buku dan literatur yang menunjang kegiatan belajar dan prosedur yaitu suatu sistem atau cara yang digunakan pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

Pembelajaran ini diarahkan untuk mendorong individu belajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar. Kegiatan belajar mengajar dilandasi oleh prinsip-prinsip berikut: 1) Berpusat pada peserta didik; 2) Mengembangkan kreativitas peserta didik; 3) Menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang; 4) Mengembangkan beragam kemampuan yang bermuatan nilai; 5) Menyediakan pengalaman belajar yang beragam; 6) Belajar melalui berbuat (Munib, 2006).

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mata pelajaran dengan fokus pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan atau *civics* atau *civics education* adalah pendidikan atau pengajaran untuk mengembangkan kesadaran akan dirinya sebagai Warga Negara, dengan hak-hak dan berbagai tanggung jawabnya dalam diri peserta didik. Di Indonesia pada zaman prakemerdekaan yang dikenal adalah pendidikan atau pengajaran “Budi pekerti” yang menanamkan dalam peserta didik asas-asas moral, etika dan etiket yang melandasi sikap dan tingkah laku dalam pergaulan kehidupan keluarga, komunitas, dan masyarakatnya (Widiastono, 2004). Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur moral yang berakar pada budaya Bangsa Indonesia, yang diharapkan dapat mewujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (Depdikbud, 1997).

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan meliputi: 1) Berpikir kritis terhadap isu Kewarganegaraan; 2) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 3) Berkembang secara positif dan demokratis; dan 4) Berinteraksi dengan bangsa lain (Priyanto, 2005)

Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan yaitu sebagai wahana dalam membentuk warga Negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, setia kepada bangsa dan Negara Indonesia dengan kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai Pancasila dan UUD 1945.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan umumnya melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, yang meliputi: 1) Konstruktivisme, 2) Inkuiri, 3) bertanya, 4) Masyarakat belajar, 5) Pemodelan, 6) Refleksi, dan 7) Penilaian otentik (Priyanto, 2005). Selain pendekatan pembelajaran diatas jugadi perlukan berbagai komponen pembelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran yang maksimal. Komponen pembelajaran tersebut diantaranya: a) Materi pembelajaran, b) Media pembelajaran, c) Metode pembelajaran, d) Pendekatan pembelajaran.

SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan yaitu mata pelajaran dengan fokus pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga Negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Penanaman nilai demokrasi pada masasekarang ini bisa ditanamkan sejak dini melalui kegiatan saling menghargai satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S. (2012). *Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Belajar
- Hadi, A. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Pustaka Setia
- Lincoln, A. (2003). *Pengertian Demokrasi*. Di Akses di (<http://phicumbritz.blogspot.com/2010/06/pengertian-demokrasi-menurut-para-ahli.html>)
- Munib, A. (2004). *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Semarang. UNNES Press
- Parsudi Suparlan. 1986. “Keluarga dan Keekerabatan,”
- Priyanto, S. (2005). *Kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi)*. Semarang. FIS UNNES
- Saripuddin, U. (1989). *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila di*

- Sekolah Menengah: Suatu Penelitian Kepustakaan. Jakarta. P2LPTK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Setiawan, D. (2015). *Kapita Selekta Kewarganegaraan*. Medan. Larispa Indonesia.
- Subadi, T. (2008). *Sosiologi*. Surakarta. BP-FKIP UMS
- Suseno, S. (2013). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Tim Abdi Guru. (2006). *Pendidikan Kewarganegaraan SMP kelas VII*. Jakarta. Erlangga
- Widiastono, D. T. (2004). *Pendidikan Manusia Indonesia*. Jakarta. PT. Kompas Media Nusantara.
- Widjaja, H. A. W. (1986). *Manusia Indonesia Individu Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta. Akademika Pressindo
- Winarno, W. (2014). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Zamroni, Z. (2001). *Pendidikan untuk Demokrasi*. Yogyakarta. Bigraf Publiishing
- Zamroni, Z. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Bandung. Alfabeta.